

BAB V

KESIMPULAN

Yunani merupakan negara yang berada di kawasan Mediterania, dimana terletak di bagian selatan benua Eropa. Sebelum terjadinya krisis kondisi domestik negara Yunani telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan terhadap kekayaan pribadi. Loyalitas peminjaman diberikan oleh bank-bank untuk mendukung usaha rumah tangga dimana merupakan salah satu pemasukan pendapatan Yunani terbesar. Langkah besar pun diambil oleh bank komersial di Yunani dengan melakukan peminjaman dana yang besar terhadap kreditor eksternal, selain itu peminjam dana ini juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan negara, namun hasil dari peminjaman dana oleh pemerintah ini tidak digunakan untuk pembangunan yang menunjukkan hasil *sustainable* yang kemudian dapat menambah keuangan negara. Kurang bijaksananya pemerintah Yunani dalam mengelola uang, penghindaran pajak dan tingginya angka korupsi Yunani, membuat Yunani sering mengalami kegoyahan perekonomian. Tingkat belanja negara yang lebih besar di bandingkan pendapatan merupakan hal yang sudah terjadi sejak lama. Defisit GDP pun tidak mampu dihindari oleh negara yang tumbuh dari uang pinjaman ini. Sehingga tidak heran krisis yang terjadi pada tahun 2008 merupakan akibat beban hutang yang tidak mampu dibayarkan.

Masuknya Yunani ke dalam organisasi Uni Eropa seperti Eurozone pada tahun 2001 diharapkan mampu mengubah Yunani menjadi negara mandiri dan stabil yang mana juga mampu menghindari Yunani dari krisis yang kelak akan menerpa kembali. Selama beberapa tahun Yunani telah menikmati hasil suku bunga dari bergabung ke EZ dan

keuntungan integrasi Uni Eropa seperti, masuknya pasar tenaga kerja, meluasnya hubungan perdagangan internasional, dan pemulihan ekonomi. Tetapi sekejap kondisi ini berubah ketika Yunani terkena efek domino yang berawal dari Amerika Serikat yang terkena krisis keuangan. Manipulasi terhadap defisit GDP dan hutang-hutang Yunani yang merupakan syarat masuknya Yunani ke dalam EZ, akhirnya terkuak pada saat krisis.

Krisis ekonomi Yunani ini pun tidak bisa di biarkan begitu saja, karena ditakutkan akan berdampak pada negara-negara yang rentan akan mengalami hal yang sama seperti Spanyol dan Rumania. Pemerintah Yunani pun mencoba meminta bantuan kepada Uni Eropa yang kemudian terbentuklah Troika yang terdiri dari *Europe Commission*, *Europe Central Bank*, dan IMF. Terbentuknya Troika bertujuan untuk memberikan dana talangan *bailout*. Dimana *bailout* ini diberikan secara bertahap yaitu pada tahun 2010, kemudian mendapatkan tambahan pada tahun 2012, 2015 dan *bailout* terakhir pada tahun 2018. Adapun syarat yang diajukan oleh Troika adalah Yunani melakukan kebijakan penghematan, mereformasi kebijakan politiknya dan mengambil alih aset negara.

Akibat dari syarat yang diajukan oleh Troika yang kemudian memaksa Yunani untuk menjalankannya membuat masalah baru muncul terutama akibat dari penghematan pengeluaran Yunani yang berdampak pada sektor sosial, ketenagakerjaan dan pendidikan. Dampak sosial dari penghematan yaitu kemiskinan, pengangguran, kesehatan mentalitas, dan merajalelanya tunawisma. Ketika masalah ini terjadi maka akan mendorong seseorang untuk melakukan upaya jalan keluar dari permasalahan yang mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka. Salah satunya yang sering terjadi pada negara-negara yang mengalami krisis adalah bermigrasi.

Migrasi seperti menjadi jalan keluar untuk menyambung hidup menjadi yang lebih baik.

Yunani merupakan negara yang berada di daerah selatan Eropa dimana menjadi jalur masuk dan keluarnya para migran. Imigran di Yunani mengalami peningkatan sejak Yunani bergabung ke dalam Eurozone yang terlihat pada tahun 2006 meningkat sekitar 100.000 imigran legal. Peningkatan yang terus terjadi setiap tahunnya tampaknya tidak didukung dengan upaya pencegahan dari pemerintah dalam membatasi laju imigran, ditambah pada tahun 2008 arus imigrasi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika untuk mencari suaka juga meningkat, hingga terjadi krisis kemanusiaan akibat aksi pemerintah Yunani yang kurang peduli terhadap para imigran tersebut. Walaupun, masuknya imigran baik secara legal maupun ilegal secara makroekonomi menguntungkan karena dapat menutupi jumlah pengangguran warga Yunani dan dapat berkontribusi terhadap perpajakan dan dana sosial Yunani seperti pensiunan.

Emigrasi merupakan salah satu indikator di dalam demografi yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk suatu negara. Di dalam prosesnya ada migrasi dalam yang merupakan orang yang masuk negara tertentu dari luar negeri dan migrasi keluar yang merupakan orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya. Hampir negara-negara yang terkena krisis melakukan emigrasi salah satunya Yunani. Emigrasi di Yunani telah terjadi sebelumnya dalam dua gelombang yaitu pada awal memasuki abad ke-20 dan pasca perang dunia ke dua. Pada kedua gelombang emigrasi ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan minim keahlian khusus. Namun pada masa krisis adanya fenomena emigrasi yang didominasi oleh para intelektual dan anak muda Yunani yang melakukan perpindahan menuju negara-negara yang tergabung ke dalam OECD. Para

intelektual ini beremigrasi kebanyakan menuju negara Jerman, Amerika, Australia, Inggris, Belanda dan Swiss.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 menandakan eksodus emigrasi ketiga setelah pasca perang dunia ke-2. Yunani telah memiliki dinamika sejarah emigrasi yang panjang. Tetapi emigrasi pada tahun 2008 sangat berbeda dengan yang terjadi pada zaman dulu. Para intelektual bermigrasi menyandang gelar sarjana, doktor dan tenaga profesional yang tentunya memiliki kualifikasi yang baik dibidangnya. Pindahannya para intelektual menuju negara-negara maju yang tergabung ke dalam OECD dikarenakan adanya daya dorong dari dalam negeri dan daya tarik yang diberikan oleh negara tujuan. Daya dorong para intelektual melakukan emigrasi selain dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi dimana lapangan pekerjaan yang minim dan sistem upah yang dipotong membuat banyak para intelektual yang bekerja tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan hilangnya pekerjaan yang sesuai kualifikasi para intelektual membuat para intelektual Yunani enggan bekerja di dalam negeri. Tidak heran ketika mereka mencari pekerjaan di luar negeri. Di samping itu sebelum terjadi krisis Yunani, kurangnya apresiasi pemerintah terhadap pekerja intelektual Yunani terlihat dari maraknya praktik nepotisme di kalangan pejabat pemerintahan di Yunani. kemudian, jika dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara Yunani pada bagian alokasi dana pendidikan dan penelitian masih rendah dibandingkan negara-negara lain di Uni Eropa.

Sedangkan, daya tarik di negara tujuan inilah yang kemudian mampu meraup keuntungan dari keahlian para intelektual Yunani dengan memberikan kemudahan untuk kewarganegaraan, asuransi, luasnya lapangan pekerjaan, upah yang lebih besar dan lingkungan pekerjaan yang baik.

Akibatnya eksodus yang berlebih terhadap emigrasi para intelektual menciptakan fenomena *brain drain* di Yunani. dalam melihat fenomena *brain drain* ini terdapat 2 pandangan. Pertama, *brain drain* dapat menjadi positif ketika *brain drain* merupakan bagian dari penyebaran sumber daya manusia, teknologi dan pendapatan bagi negara asal maupun negara penerima, yang mana di negara asal selain mengurangi jumlah penduduk dan pengangguran dapat memberikan remiten ekonomi dan sosial bagi negara asal. Kedua, *brain drain* menjadi buruk terhadap negara-negara berkembang ataupun terkena krisis karena negara telah kehilangan sumber daya manusia berkompennya yang kemungkinan dapat memberikan perubahan maupun pemulihan pada kondisi domestik yang sedang goyah. Realitasnya Yunani bukanlah negara dengan kondisi yang baik-baik saja yang kemudian dapat mengubah *brain drain* menjadi *brain gain*. Yunani pada saat ini masih menepati posisi pemulihan dimana membutuhkan tenaga kerja yang berkompeten untuk membantu negara yang terpuruk. Sangat disayangkan jumlah para intelektual ini tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang mana permintaan domestik Yunani yang gagal menyerap tenaga kerja.

Remiten ekonomi yang diharapkan dari para *brain drain* tidak bisa dipastikan akan meningkat, karena para *brain drain* berpindah kebanyakan bersama keluarganya yang bersifat permanen, dan para *brain drain* ini cenderung berasal dari kondisi keluarga menengah ke atas. Kemudian, enggannya para *brain drain* untuk kembali ke Yunani membuat peluang Remiten sosial berupa ide dan pengetahuan kelak akan menurun.

Dalam menangani permasalahan ini, Pemerintah Yunani melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi emigrasi para intelektual. Upaya yang dilakukan pemerintah secara regulasi memang tidak mengkhususkan kebijakan tersebut diperuntukkan pada emigrasi para intelektual Yunani,

namun pemerintah lebih memfokuskan kebijakannya terhadap faktor dasar para intelektual Yunani melakukan emigrasi seperti karena pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan dan ketidakstabilan ekonomi negara, berupa di bentuknya undang-undang, maupun mereformasi kebijakan tentang ketenagakerjaan, memperbaiki sistem pendidikan, dan meningkatkan pembangunan.

Pencegahan yang dilakukan ditargetkan tidak membutuhkan biaya banyak yang mana biaya ini berasal dari dana talangan *bailout* yang diberikan dan beberapa dana diberikan oleh organisasi internasional yang dikhususkan untuk di bidang tertentu seperti pendidikan dan penelitian. Walaupun, kebijakan pemerintah dan reformasi struktural yang masih baru dicanangkan oleh pemerintah berjalan masih sangat lambat untuk membuat para intelektual Yunani kembali tetapi pemerintah Yunani dapat memangkas angka pengangguran pada masa krisis dan dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dibuktikan bahwa Yunani merupakan negara yang secara historis bisnis adalah tumpuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Tidak heran, jika banyak para emigran yang berasal dari Yunani diluar negeri membuka usaha sendiri. Melihat kultur dan kemampuan masyarakat dalam bisnis inilah yang menjadi strategi Yunani untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatannya dengan memberikan insentif untuk anak muda Yunani dalam membuka bisnis dan menetapkan kebijakan kepada setiap perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada pengangguran Yunani dengan cara memberikan timbal balik berupa insentif dan adanya dana hibah. Dampaknya insentif ini mampu mengurangi pengangguran Yunani pasca krisis ekonomi sekitar 23% pada kuartal pertama tahun 2016. Tidak hanya itu upaya pemerintah yang perlahan-lahan dapat mengembalikan

pertumbuhan Yunani juga ditunjukkan dengan berbondong-bondongnya investor untuk berinvestasi dibidang pariwisata, perkapalan, dan pelabuhan. Dari data yang diberikan oleh Bank Sentral Yunani memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Yunani naik dalam sembilan bulan pertama tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016 silam.

Upaya yang dilakukan pemerintah juga dengan mereformasi sistem standarisasi pengupahan di Yunani, dimana adanya pemotongan upah minimum Yunani sebanyak 22%, dan lebih mendesentralisasikan kebijakan buat dengan memindahkan kewenangan tersebut dari mitra sosial ke pemerintah. Upaya ini pun membuahkan hasil bagi perusahaan karena akan mempermudah perusahaan dalam mengatur keuangannya tentunya usaha untuk menstabilkan perusahaan. Upaya reformasi ini sebagai salah satu tindakan pemerintah untuk membatasi perusahaan meraup keuntungan yang berlebih yang mana dapat merenggut hak-hak pekerja Yunani.

Kebijakan dan reformasi struktural yang mulai dijalankan oleh pemerintah diprediksi akan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Yunani ditambah dana talangan *bailout* yang akan diturunkan pada tahun 2018 ini akan dikururkan kembali oleh Troika nantinya akan dialokasikan di sektor pendidikan, sosial, dan pasar ekspor Yunani yang di harapkan gebrakan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Yunani dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan tentunya dapat menarik minat para intelektual Yunani kembali.